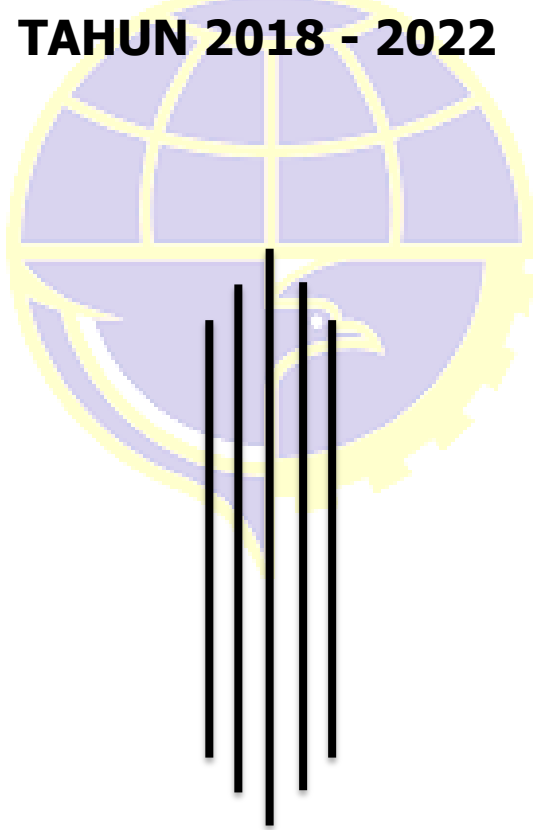




**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN**

**KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2018 - 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahuwataa'la, Tuhan Yang Maha Esa, tim penyusun Rencana Akhir Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan telah menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahun kedepan yang dimulai dari tahun 2018 – 2022. Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini tentunya mengacu pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM, dan RKPD.”

Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan tugas perbantuan di bidang perhubungan. Renstra ini diperuntukkan sebagai pendukung data bagi pimpinan dalam rangka penetapan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi redaksional maupun dari segi cakupan materinya. Karena itu berbagai masukan baik saran maupun kritik yang positif sangat dihargai kesempurnaannya.

Singkawang, 07 Juni 2018
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang



Drs. SUMASTRO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang	11
2.2 Sumber Daya Aparatur Dishub Kota Singkawang	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dishub Kota Singkawang	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dishub Kota Singkawang	30
2.4.1 Tantangan	30
2.4.2 Peluang	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
5.1 Strategi	48
5.2 Arah Kebijakan	49

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	52
6.1 Rencana Program	52
6.2 Kelompok Sasaran	57
6.3 Pendanaan	57
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	58
BAB VIII PENUTUP	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah ASN Dishub Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2018	25
Tabel 2.2.2 Komposisi ASN Dishub Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	25
Tabel 2.2.3 Komposisi Sumber Daya ASN Dishub Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	27
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan (terdapat pada lampiran).....	
Tabel 3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan.....	41
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan	47
Tabel 5.2.1 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan.....	50
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan (terdapat pada lampiran).....	
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kota Singkawang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 272 mewajibkan perangkat daerah menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (2), yang berbunyi: "Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Rencana Strategis Dinas Perhubungan mengacu pada RPJMD Kota Singkawang. Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan menjabarkan tujuan dan sasaran, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman

pdalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang tahun 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025 visi, misi dan program prioritas Walikota terpilih dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD merupakan prioritas dari Walikota terpilih yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan dengan mengacu pada RPJMD, sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang bertanggungjawab atas penyusunan rancangan Renstra tersebut.

Renstra Dinas Perhubungan yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program Dinas Perhubungan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang terdapat di dalam RPJMD. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Singkawang yang terdapat di dalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
21. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang;
22. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2018-2022 ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun dan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2018-2022. Dokumen Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja Dinas Perhubungan).

Adapun tujuan umum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2018- 2022, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Provinsi dan Nasional.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan seluruh unit Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara terpadu, terarah dan terukur;
2. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD & RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD (Pasal 111), maka Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang dengan RPJMD, Renstra K/ L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi dan dengan Renja Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perhubungan Kota Singkawang (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dan/ atau indikator seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan

Kota Singkawang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Perhubungan Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun (tahun 2018 - 2022).

BAB VII INDIKATOR KINERJA DISHUB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan terbentuk atas struktur organisasi/ sub unit kerja yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perhubungan dengan melibatkan serta peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
3. Bidang-bidang yang terdiri dari:
 - a. Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan , yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 3) Seksi Kepelabuhan dan Dermaga.

- b. Bidang Perhubungan Darat, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Darat;
 - 2) Seksi Angkutan Darat;
 - 3) Seksi Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana Prasarana Darat;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Udara dan Angkutan Sungai, Danau dan penyebrangan;
 - 3) Seksi Penerangan Jalan Umum.
4. UPT
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok:

Tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan

2. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap Bidang:

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas seorang Kepala Dinas Perhubungan adalah memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perhubungan, berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan Kepegawaian, yang meliputi tata persuratan, kearsipan organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harga Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

B. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), Rencana Strategis (Renstra), perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan.

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan tidak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

1. Bidang-Bidang di Dinas Perhubungan:

a. Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis lalu lintas angkutan laut;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kepelabuhan dan dermaga;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan terbagi menjadi 3 (tiga) sub bidang, yaitu:

b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

Seksi lalu lintas angkutan laut mempunyai beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang lalu lintas angkutan laut;
- c) Melaksanakan perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- d) Melaksanakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- e) Melaksanakan perizinan usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Seksi lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis Lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- c) Melaksanakan perizinan usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;

- d) Melaksanakan perizinan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek;
- e) Melaksanakan perizinan usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- f) Melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kota;
- g) Melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- h) Melaksanakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah.

d. Seksi Kepelabuhanan dan Dermaga

Seksi kepelabuhanan dan dermaga memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kepelabuhanan dan Dermaga;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kepelabuhanan dan dermaga;
- c) Melaksanakan Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- d) Melaksanakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- e) Melaksanakan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- f) Melaksanakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- g) Melaksanakan perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;

- h) Melaksanakan perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- i) Melaksanakan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- j) Melaksanakan perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- k) Melaksanakan perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- l) Melaksanakan perizinan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

e. Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan Darat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis lalu lintas darat;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis angkutan darat;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis manajemen dan rekayasa transportasi darat;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Perhubungan Darat;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Darat terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu:

f. Seksi Lalu Lintas Darat

Seksi lalu lintas darat memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Lalu Lintas Darat;
- b) mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis lalu lintas darat;
- c) melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d) melaksanakan pengelolaan perpajakan, izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e) melaksanakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
- f) melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan pencegahan kecelakaan lalulintas.

g. Seksi Angkutan Darat

Seksi angkutan darat memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Angkutan Darat;
- b) mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis angkutan darat;
- c) melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- d) penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- e) penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 daerah;
- f) penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- g) penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;

- h) penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- i) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- j) izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- k) penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

h. Seksi Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat

Seksi manajemen dan rekayasa transportasi darat memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Transportasi;
- b) mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa transportasi darat;
- c) melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;
- d) memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
- e) melaksanakan sosialisasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- f) melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

i. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a) penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana;
- b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana dan prasarana perhubungan darat;

- c) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana dan prasarana perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis peneranganjalan umum;
- e) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Sarana dan Prasarana;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana memiliki 3 (tiga) sub bidang yang terdiri dari:

j. Seksi Sarana dan Prasarana Darat

Seksi sarana dan prasarana darat memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Darat;
- b) mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis sarana dan prasarana darat;
- c) melaksanakan pengelolaan perlengkapan jalan.

k. Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Udara dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Udara, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Laut;
- b) Mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis sarana dan prasarana laut, angkutan sungai, danau, penyeberangan;

- c) Melaksanakan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan lokal;
- d) Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran.

1. Seksi Penerangan Jalan Umum

Seksi Penerangan Jalan Umum memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Penerangan Jalan Umum;
- b) mengumpulkan dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis penerangan jalan umum;
- c) melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pelayanan penerangan jalan umum.

3. UPT

Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

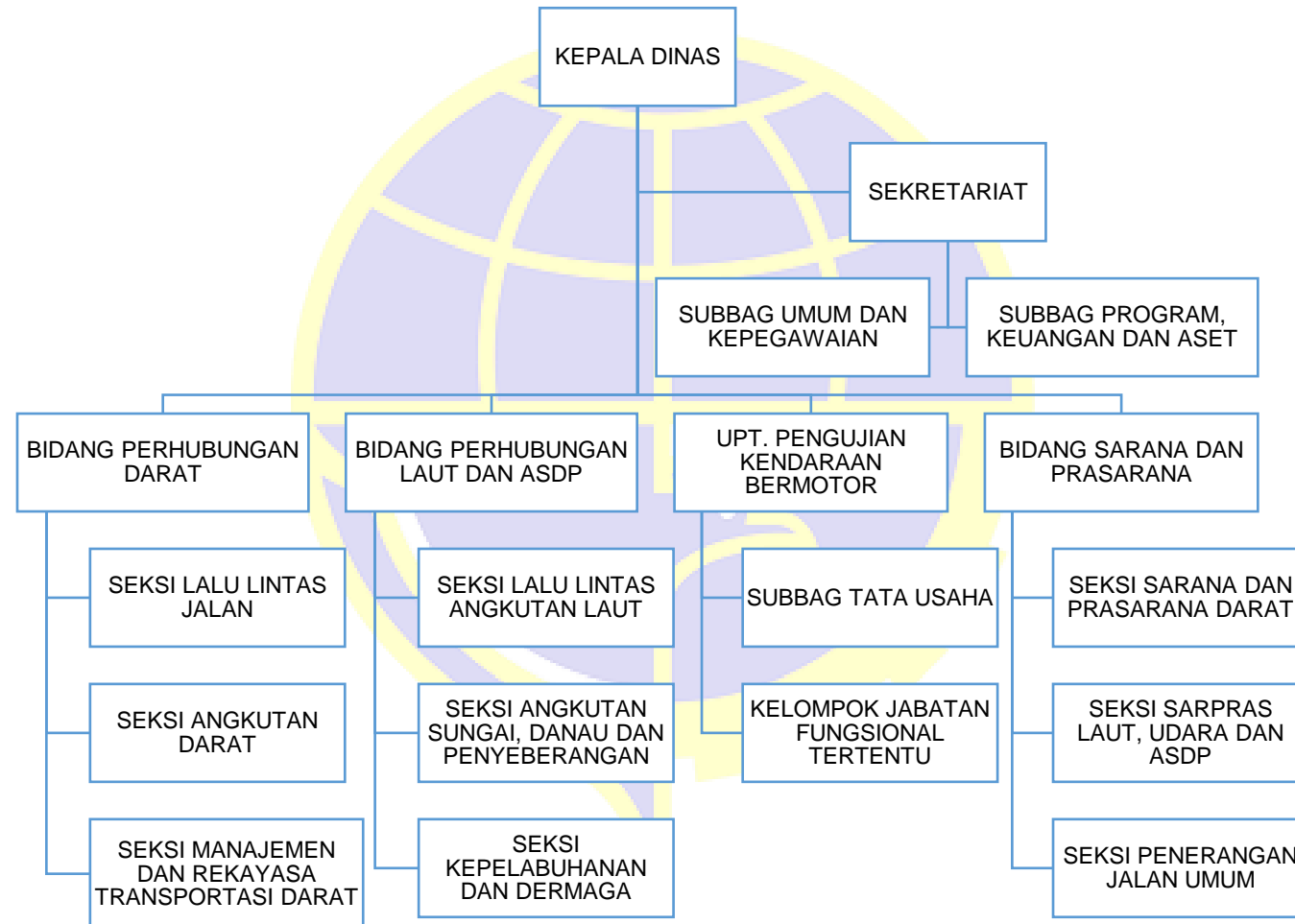
- a) penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b) pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor;
- c) pelaksanaan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- d) pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laikjalan kendaraan bermotor;
- e) pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
- g) pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan

- h) program, tata usaha, keuangan dan perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- j) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- k) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

STRUKTUR ORGANISASI DISHUB TAHUN 2018



2.2 Sumber Daya Aparatur Dishub Kota Singkawang

Dishub Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah aparatur Dishub pada saat ini berjumlah 52 (Lima Puluh Dua) orang.

Selain itu, dengan bertambahnya aparatur yang memiliki tingkat dan disiplin ilmu yang beragam akan memungkinkan bagi Dishub melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam bidang perhubungan Kota Singkawang yang lebih terarah, terpadu dan sinergis.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, memberikan konsekuensi pada perubahan serta penambahan bidang yang sangat berbeda dibandingkan bidang-bidang yang pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemudian berpengaruh pada penambahan jumlah aparatur untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Namun, pendistribusian jumlah staf di setiap bidang amatlah terbatas. Keterbatasan jumlah staf pada tiap bidang kerja menuntut Dishub Kota Singkawang menerapkan sistem pemberdayaan aparatur secara efisien dan efektif.

Bila ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya aparatur yang terdapat pada Dishub Kota Singkawang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah ASN Dishub Menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2018

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	
1	Pembina Utama Muda/ IV.c	1	Orang
2	Pembina Tk.I/ IV.b	1	Orang
3	Pembina/ IV.a	3	Orang
4	Penata Tk.I/ III.d	9	Orang
5	Penata/ III.c	5	Orang
6	Penata Muda Tk.I/ III.b	7	Orang
7	Penata Muda/ III.a	7	Orang
8	Pengatur Tk.I/ II.d	10	Orang
9	Pengatur/ II.c	5	Orang
10	Pengatur Muda Tk I/II.b	1	Orang
11	Pengatur Muda/II.a	1	Orang
12	Juru Tk. I/I.d	1	Orang
13	Juru/I.c	1	Orang
Total		52	Orang

Adapun gambaran persebaran sumber daya aparatur Dishub menurut jenis kelamin yang dibagi menurut bidang serta jabatan yang ada serta komposisi sumber daya ASN Dishub berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2.2.1 dan tabel 2.2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Komposisi ASN Dishub Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Bidang/ Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah (Orang)
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dishub	√		1
2	Sekretariat			
	<i>Sekretaris</i>		√	1
	<i>Kasubbag</i>		√	2
	<i>Staf</i>	6 √	4 √	10
3	Bidang Perhubungan Laut dan ASDP			
	<i>Kepala Bidang</i>	√		1
	<i>Kasi</i>	√		3
	<i>Staf</i>	√		2

4	Bidang Perhubungan Darat			
	<i>Kepala Bidang</i>	√		1
	<i>Kasi</i>	√		3
	<i>Staf</i>	√		12
5	Bidang Sarana dan Prasarana			
	<i>Kepala Bidang</i>	√		1
	<i>Kasi</i>	√		3
	<i>Staf</i>	√		6
5	UPT PKB			
	<i>Kepala UPT</i>	√		1
	<i>Kasubbag</i>	√		1
	<i>Staf</i>	√		4
Jumlah				52

Tabel 2.2.3
Komposisi Sumber Daya ASN Dishub Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor(S-3)	-
2	Pasca sarjana (S-2)	2
3	Sarjana(S-1)	11
4	Diploma(D-4)	5
5	Diploma(D-3)	6
6	Diploma(D-2)	1
7	Diploma(D-1)	0
8	SLTA	23
9	SLTP	2
10	SD	2
	Jumlah	52

Tabel 2.2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Singkawang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase peningkatan tertib administrasi perkantoran dan tertib penyusunan dan penyampaian laporan				65%	70%	75%	80%	90%	80%	80%	80%	85%	90%	0,81%	0,87%	0,94%	0,94%	1%
2	Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur mencapai 100% pada tahun 2017				65%	70%	75%	80%	90%	85%	85%	85%	85%	90%	0,76%	0,82%	0,88%	0,94%	1%
3	Peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mencapai 100%				65%	70%	75%	80%	90%	75%	75%	75%	80%	85%	0,86%	0,93%	1%	1%	1,05%
4	Cakupan norma, kebijakan standar dan prosedur bidang perhubungan yang dipahami masyarakat secara baik dan benar mencapai 100% pada tahun 2017				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	1%	1%	1%	1%
5	Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan darat yang dibangun mencapai 100% pada tahun 2017				30%	35%	40%	50%	100%	15%	20%	25%	30%	50%	0,5%	0,58%	0,62%	0,6%	0,3%
6	Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan air yang dibangun mencapai 100% pada tahun 2017				35%	40%	45%	50%	55%	80%	80%	80%	80%	80%	0,44%	0,5%	0,56%	0,63%	0,69%
7	Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan udara yang dibangun mencapai 100% pada tahun 2017				35%	40%	45%	50%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

8	Persentase Pembangunan halte bus mencapai 50% pada tahun 2017				25 %	35%	40%	45%	50%	25%	35%	40%	50%	50%	1%	1%	1%	0,9%	1%
9	Persentase rencana induk / aksi dearah inovasi pengembangan sistem jaringan transportasi terpadu mencapai 50% pada tahun 2017				-	35%	40%	45%	50%	-	50 %	50 %	50 %	50 %	-	0,7%	0,8%	0,9%	1%
10	Persentase akurasi database jaringan transportasi perkotaan mencapai 50% pada tahun 2017				30%	35%	40%	45%	50%	30 %	35 %	50 %	50 %	50 %	1%	1%	0,8%	0,9%	1%
11	Persentase akurasi database pelabuhan mencapai 50% pada tahun 2017				30%	35%	40%	45%	50%	30%	35 %	50 %	50 %	50 %	1%	1%	0,8%	0,9%	1%
12	Persentase akurasi database bandar udara mencapai 50% pada tahun 2017				30%	35%	40%	45%	50%	30 %	35 %	40 %	50 %	50 %	1%	1%	1%	0,9%	1%
13	Cakupan pelayanan Terminal Pasiran dan Beringin				65%	65%	60%	55%	50%	20%	23%	25%	28%	30%	0,30%	0,35%	0,42%	0,50%	0,6%
14	Cakupan pelayanan Pelabuhan Sedau dalam 5 tahun				30%	35%	40%	50%	60%	30%	35%	60%	65%	65%	1%	1%	0,67%	0,77%	0,92%
15	Tingkat Pelanggaran lalu lintas menurun hingga 0% pada tahun 2017				30%	25%	20%	20%	20%	5%	7%	10%	12%	15%	0,17%	0,28%	0,22%	0,6%	0,75
16	Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas mencapai 100% pada tahun 2017.				20%	35%	45%	50%	100%	60%	65%	70%	70%	70%	0,33%	0,54%	0,64%	0,71%	1,43%
17	Tingkat kelaikan sarana LLAJ mencapai 100% pada tahun 2017.				100%	100%	100%	100%	100%	15%	20%	25%	30%	50%	0,15%	0,2%	0,25%	0,3%	0,5%

18	Fasilitas perlengkapan jalan (rambu-rambu, marka dan gurdril) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota singkawang mencapai 100% pada tahun 2017.				10%	20%	75%	90%	100%	50%	53%	55%	60%	65%	0,2%	0,38%	1,37%	1,5%	1,54%
19	Peningkatan ruas jalan yang aman bagi pejalan kaki mencapai 60% pada tahun 2017.				20%	30%	40%	50%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	Persentase penurunan angka kecelakaan mencapai 30% pada tahun 2017.				70%	60%	50%	40%	30%	5%	8%	10%	12%	15%	0,07%	0,13%	0,2%	0,3%	0,5%
21	Peningkatan uji KIR mencapai 60% pada tahun 2017.				20%	30%	40%	50%	60%	25%	35%	45%	55%	65%	0,8%	0,85%	0,89%	0,90%	0,92%
22	Kepemilikan KIR angkutan umum (KIR) mencapai 80% pada tahun 2017.				60%	70%	75%	75%	80%	65%	72%	72%	71%	75%	0,92%	0,97%	1,04%	1,05%	1,06%
23	Unit pengujian kendaraan bermotor Kota Singkawang yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji mencapai 100% pada Tahun 2017.				30%	65%	75%	90%	100%	35%	60%	68%	80%	85%	0,85%	1,08%	1,10%	1,12%	1,17%
24	Tingkat penerapan sistem pengujian kendaraan bermotor secara mekanis dan pelayanan berbasis IT (SIM PKB) mencapai 100% pada tahun 2017.				50%	65%	75%	80%	90%	0%	0%	0%	0%	45%	0%	0%	0%	0%	90%

2.3 Kinerja Pelayanan Dishub Kota Singkawang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dishub sebagaimana Peraturan Walikota Singkawang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dishub Kota Singkawang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Kinerja pelayanan Dishub pada urusan bidang perhubungan tersebut teridentifikasi pada ketersediaan dokumen baik secara kualitatif maupun kuantitatif. (Tabel 2.3.1 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan dapat dilihat pada lampiran)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dishub Kota Singkawang

Kendati telah ditetapkan berbagai kebijakan di bidang perhubungan, tetapi upaya pengembangan sampai saat ini masih dihadapkan kepada tantangan dan peluang antara lain:

2.4.1 Tantangan

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
- b. Moda sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor dan ojek;
- c. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat akan kualitas dan pelayanan jasa perhubungan;
- d. Tidak seimbang nya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia;
- e. Kurangnya kualitas SDM aparatur;
- f. Belum maksimalnya koordinasi dan kesepahaman antar OPD serta komitmen masing-masing OPD lingkup Kota Singkawang;
- g. Belum optimalnya dukungan dari OPD dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan;

- h. Adanya kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar unit kerja internal;
- i. Tuntutan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang menyerap aspirasi masyarakat;
- j. Tuntutan yang semakin besar akan pengentasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dengan dicanangkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
- k. Adanya anggapan pemangku kepentingan bahwa proses pelaksanaan perencanaan belum optimal dan transparan;
- l. Belum terintegrasinya data dasar perencanaan pembangunan;
- m. Banyaknya pelanggaran keselamatan pengangkutan barang di jalan;
- n. Tuntutan Masyarakat akan Pelayanan Prima di bidang transportasi.

2.4.2 Peluang

- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan jasa perhubungan;
- b. Situasi keamanan daerah yang cukup kondusif;
- c. Memiliki kuantitas SDM aparatur daerah cukup memadai: Dari sisi kuantitas, SDM aparatur daerah yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perhubungan;
- d. Terjalinnnya koordinasi mulai dari perencanaan, *monitoring* dan evaluasi antara bidang-bidang di Dishub dengan *leading* sektor;
- e. Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Dishub;
- f. Tersedianya informasi dan data mengenai potensi pengembangan wilayah;

- g. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub;
- h. Adanya kemudahan mengakses informasi melalui fasilitas teknologi informasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
- i. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur perencana;
- j. Tersedianya sistem informasi perencanaan guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan;
- k. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
- l. Letak Kota Singkawang secara geografis yang sangat strategis;
- m. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah, sehingga program-kegiatan peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal;
- n. Adanya peran serta swasta, dinas/instansi lain di bidang lalu lintas dan angkutan;
- o. Situasi daerah yang cukup kondusif;
- p. Kritikan dan masukan masyarakat terhadap peningkatan kinerja bidang Perhubungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Transportasi merupakan sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Transportasi berfungsi menjembatani antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, yang terpisah oleh jarak. dukungan pembangunan transportasi sangat diharapkan untuk memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, seperti memberikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjamin keselamatan perjalanan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi di Indonesia. Sesuai dengan Ketentuan Menteri Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional bertujuan terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan dan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan Internasional.

Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayan tersebut tidak memfasilitasi penumpang sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, bahwa peranan pemerintah harus seminimal mungkin dan akan lebih efektif apabila kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain tidak dilakukan oleh lembaga pemerintahan, sehingga dapat mengikuti mekanisme pasar dan menjadi kompetitif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi di Wilayah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Identifikasi faktor internal:

1. Kekuatan:

- a. Visi dan Misi Walikota Singkawang;
- b. Komitmen Aparatur Dinas Perhubungan;
- c. Tersedianya Gedung Perkantoran :
 - ✓ Dinas Perhubungan;
 - ✓ Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya.
- d. Adanya dukungan pemerintah Kota Singkawang di bidang perhubungan melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- e. Tersedianya Pelabuhan antar pulau di Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
- f. Tersedianya fasilitas keselamatan jalan;
- g. Tersedianya prasarana terminal;
- h. Tersedianya penetapan lokasi pembangunan Bandar Udara;
- i. Adanya peraturan yang jelas didalam penyelenggaraan transportasi disamping dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai kewenangan yang dimiliki, juga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat;
- j. Pelayanan penyelenggaraan Perhubungan berbasis Teknologi Informasi;
- k. Tersedianya jumlah sumberdaya manusia dinas perhubungan sebanyak 76 orang.

2. Kelemahan:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan;
- b. Masih rendahnya pemahaman tentang tugas dan fungsi oleh sebagian pegawai di Dinas Perhubungan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database yang cepat, tepat, dan akurat;
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. Lemahnya koordinasi dan kerjasama di bidang Perhubungan.

Adapun identifikasi permasalahan utama dalam pelaksanaan pelayanan 5 (Lima) Tahun kedepan adalah:

- a. Belum terpenuhi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan;
- b. Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum;
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan;
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas di jalan;
- f. Terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Perhubungan;
- g. Belum memadainya peraturan yang mengatur penyelenggaraan perhubungan di daerah;
- h. Tidak adanya angkutan umum perkotaan;
- i. Trayek banyak yang berhimpitan;
- j. Pengelolaan Perparkiran.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Terpilih

Di dalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022 disebutkan bahwa Visi Pembangunan 2018-2022 adalah:

VISI :“Singkawang HEBAT 2022”

Kata “**HEBAT**” yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;

Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;

Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;

Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

MISI :

Untuk mewujudkan Visi **Singkawang HEBAT Tahun 2022**, maka Misi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
- c. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
- d. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- e. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas;
- f. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;

g. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi dan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk 5 tahun kedepan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Misi 6 **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan**

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.

Sasaran : Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas.

Dinas Perhubungan memiliki potensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dirasakan sangat vital sejalan dengan peningkatan pembangunan daerah di segala sektor kehidupan masyarakat, sehingga peningkatan pertumbuhan pembangunan ini memerlukan peningkatan jasa perhubungan, baik jasa transportasi darat, laut dan udara. Disisi lain, transportasi berperan juga dalam mobilisasi penduduk keseluruhan wilayah, sehingga transportasi tidak hanya berperan dalam menumbuhkembangkan perekonomian tetapi juga mendukung pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Pembangunan sistem transportasi yang efisien, efektif dan terpadu sangat diperlukan dalam upaya menekan biaya transportasi, sehingga produk-produk industri dan pertanian menjadi lebih kompetitif di pasar lokal, regional maupun nasional atau international yang pada gilirannya mendatangkan devisa khususnya bagi daerah dan negara pada umumnya.

Keterpaduan sistem transportasi antar moda diperlukan, dimana jaringan transportasi merupakan satu kesatuan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi darat, laut dan udara. Dalam rangka mewujudkan pembangunan transportasi yang

efisien, efektif dan terpadu tersebut, maka sistem transportasi perlu ditata sedemikian rupa, dengan tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dinas Perhubungan selain sebagai instansi teknis di bidang operasional lalu lintas dan angkutan juga mempunyai potensi sebagai salah satu instansi penggali pendapatan asli daerah dari Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Parkir Kendaraan di Kota Singkawang yang cukup potensial.

Faktor penghambat internal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran yang ada guna memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada guna menunjang aktifitas kegiatan kedinasan;
4. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang ada terhadap peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

Faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi kesadaran masyarakat di dalam menjaga sarana dan prasarana transportasi;
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang disediakan oleh operator atau penyedia jasa transportasi;
3. Rendahnya disiplin masyarakat di dalam mentaati peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
4. Luasnya wilayah kerja di dalam melayani masyarakat;
5. Masih lemahnya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah di dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

Faktor pendorong internal yang mempengaruhi pencapaian misi,

tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia perhubungan yang ada memiliki etos kerja, tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi;
2. Memiliki sarana dan prasarana guna menunjang aktifitas dan mobilitas kegiatan;
3. Adanya anggaran guna mendukung kegiatan.

Faktor pendorong eksternal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Adanya aturan perundang-undangan yang mendukung tugas-tugas kedinasan;
2. Adanya dukungan yang cukup kuat dari pihak legislatif maupun eksekutif;
3. Adanya dukungan dari operator angkutan umum di dalam menyediakan sarana transportasi;
4. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi di dalam turut berkomitmen penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
5. Kemudahan dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan

permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Pelayanan bidang Transportasi pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan batas administrasi pemerintahan, oleh karena itu koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting, disamping koordinasi lintas sektoral. Disamping itu, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan juga menjadi sangat penting, sehingga akan mempertegas tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.

Perencanaan Pengembangan Transportasi terkendala oleh Peraturan Pemerintah Pusat (PP dan UU) serta Peraturan Daerah (Perda) yang masih terbatas dan terkadang tidak sejalan dalam pelaksanaannya. Disamping itu, pelaksanaan otonomi daerah Bidang Perhubungan belum memiliki ruang lingkup jelas. Hal ini terindikasi dengan masih banyaknya subsektor laut dan udara yang merupakan kendali langsung Kementerian Perhubungan.

**Tabel 3.3.1
Telaah Renstra Kementerian Perhubungan**

No	Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Keselamatan dan keamanan Transportasi	Menurunnya Tingkat kecelakaan Transportasi	Kurangnya fasilitas keselamatan Lalu lintas pada ruas jalan kabupaten, propinsi dan nasional	Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas baik pada tingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat
		Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	Kurangnya fasilitas keselamatan Lalu lintas pada ruas jalan kabupaten, propinsi dan nasional	Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas baik pada tingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat

2	Pelayanan Transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Kurang Koordinasi	Melaksanakan koordinasi ke Pemerintah Pusat untuk bidang Perhubungan darat, laut dan udara.
		Belum terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan	Belum adanya pemanggilan peserta Dilkat	Adanya Kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.
		Rendahnya jumlah SDM dengan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan	Keterbatasan Anggaran	Telah ditandatangani MOU dengan STTD Bekasi
		Rendahnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan <i>good governance</i>	Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan perencanaan Pemeliharaan Prsarana dan Fasilitas LLAJ	Terciptanya Keselamatan dan Kemanan Transportasi
		Kurangnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan	Kurangnya peraturan (peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, keputusan kepala dinas) yang menjadi dasar teknis penyelenggaraan bidang Transportasi.	Terciptanya Keselamatan dan Kemanan Transportasi
		Tingginya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi	Perusahaan belum sadar akan tingginya tingkat emisi kendaraan	Dilaksanakannya Uji Emisi Kendaraan di tiap-tiap perusahaan.
		Rendahnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan <i>clean governance</i>	Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan perencanaan Pemeliharaan Prsarana dan Fasilitas LLAJ	Terciptanya Keselamatan dan Kemanan Transportasi
3	Kapasitas Transportasi	Rendahnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan	Pengusaha belum melihat potensi pergerakan penumpang untuk angkutan pedesaan	Evaluasi dan Sosialisasi terhadap jaringan trayek Angkutan

		keterpaduan antarmoda/multimoda		
		Rendahnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia	Masyarakat lebih memilih Angkutan Pribadi terutama sepeda motor	Sosialisasi terhadap angkutan umum
		Rendahnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Masyarakat lebih memilih Angkutan Pribadi terutama sepeda motor	Sosialisasi terhadap angkutan umum

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2010-2030 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Singkawang. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Singkawang terdiri atas :

- a. Pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah;
- b. Pengembangan sub pusat-sub pusat pelayanan kota dan pusat-pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;

- d. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- f. Perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- g. Perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan;
- h. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- i. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
- j. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kota Singkawang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- a) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kota Singkawang;
- b) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kota Singkawang.

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah, meliputi:

- a) Pembangunan Bandar Udara Baru Kota Singkawang;
- b) Pembangunan Terminal Tipe A ALBN/AKDP yang melayani trayek Singkawang – Kuching Malaysia;

c) Pembangunan Jalan Lingkar.

Fasilitas ini dapat mengangkat potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Kota Singkawang akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata yang cukup banyak di Kota Singkawang.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) sebagai berikut:

- a. Kurangnya kebijakan pemerintah daerah di dalam menata dan mengembangkan transportasi pada sektor perhubungan;
- b. Sulitnya memperoleh lahan guna mengembangkan prasarana transportasi;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pengadaan dan pemasangan prasarana transportasi;
- d. Kualitas dan ketersediaan sarana transportasi yang tersedia dalam melayani masyarakat sangat rendah;
- e. Kurangnya anggaran guna pengadaan sarana transportasi dan subsidi terhadap angkutan umum;

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai berikut:

- a. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di wilayah Kota Singkawang yang berakibat pada tingkat kualitas udara menjadi menurun sebagai akibat gas buang dari kendaraan bermotor;
- b. Belum semua kendaraan melaksanakan uji emisi gas buang;
- c. Belum tegasnya aturan perundang-undangan terhadap pelanggaran emisi gas buang;
- d. Tidak adanya penampungan limbah sisa-sisa suku cadang dan pelumas kendaraan bermotor pada bengkel kendaraan bermotor sehingga terjadi pencemaran tanah dan air.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang terkait dengan Dinas Perhubungan, adalah sebagai berikut:

- a. Masih mengikhtiarkan penyediaan tanah sebagai lokasi Pembangunan Bandara Baru di Kota Singkawang dan penyesuaian/revisi dokumen perencanaan/studi yang diperlukan sebagai konsekuensi adanya pergeseran lokasi bandara tersebut.
- b. Masih rendahnya peranan angkutan umum di dalam memperlancar mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain, karena operator angkutan umum hanya mampu menyediakan armada angkutan umum dengan standar pelayanan yang kurang maksimal;
- c. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi;
- d. Adanya program pemerintah pusat di bidang keselamatan jalan yaitu dekade keselamatan jalan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan materi;
- e. Kuantitas perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas-ruas jalan kabupaten/ kota masih rendah;
- f. Pengurangan emisi gas buang yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya guna menunjang program langit biru;
- g. Penggunaan tenaga surya (*solarcell*) pada alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) guna menunjang *greenenergy*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kepala Daerah maka Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan:
 - a. Terwujudnya aparaturnya perhubungan yang kompeten dan profesional;
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang cukup secara kualitas dan kuantitas;
 - c. Terwujudnya keterpaduan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, keterjangkauan penyelenggaraan pelayanan perhubungan;
 - d. Terwujudnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan.
2. Sasaran Jangka Menengah:
 - a. Meningkatnya sumber daya manusia aparaturnya perhubungan yang berkompetensi dan profesional;
 - b. Terpenuhinya infrastruktur transportasi strategis dan fasilitas pendukungnya;
 - c. Meningkatnya pemenuhan standarisasi penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi ;
 - d. Meningkatnya Manajemen Sektor Perhubungan yang bersih, transparan, efektif dan efisien;
 - e. Meningkatnya pelayanan publik dan penyelenggaraan perhubungan yang terpadu, selamat, aman, nyaman, tertib, lancar dan terjangkau.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas	1	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara / Terminal Bis Kondisi Baik	4	5	5	5	6
			2	Persentase Panjang Jalan yang Mendapat Penerangan (%)	59,8%	63,35%	67,33%	71,43%	76,02%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan. Strategi mencakup penentuan kebijakan dan program terpilih dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tahun bersangkutan.

Adapun strategi yang tepat guna mendukung terwujudnya tujuan yang akan dilakukan adalah :

1. Strategi 1

Guna mendukung terwujudnya tujuan dalam merumuskan kebijakan teknis tentang sistem pengelolaan transportasi adalah dengan penyusunan perencanaan yang melihat kondisi *existing* serta permasalahan yang ada dilapangan dimana jika permasalahan masih bersifat sektoral dan tidak memberi dampak pada sektor lain akan ditindak lanjut dengan perencanaan yang bersifat tindakan jangka pendek, dan jika permasalahan bersifat banyak sektor yang terkena dampak serta perlu penanganan jangka panjang maka dirumuskan dalam suatu dokumen yang disusun dengan melibatkan ahlinya serta dengan seluruh instansi terkait baik instansi otonom maupun daerah dan diharapkan mampu menciptakan sistem yang handal serta mampu menciptakan regulasi di bidang perhubungan.

2. Strategi 2

Dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang transportasi adapun strategi yang akan digunakan adalah dengan upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi semaksimal mungkin terutama dengan membangun sarana dan prasarana transportasi baik di darat, maupun upaya membuka aksesibilitas daerah kepulauan dengan

transportasi yang cepat, murah, aman dan nyaman serta diharapkan efektif dan efisien. Selain itu upaya-upaya yang akan dilakukan guna melibatkan sektor swasta didalam penyediaan sarana transportasi umum sehingga mampu menciptakan usaha dibidang transportasi serta percepatan ketersediaan sarana transportasi umum.

3. Strategi 3

Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur strategi yang digunakan adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh daerah maupun yang diusulkan melalui provinsi maupun kementerian perhubungan serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya yang diakui oleh pemerintah.

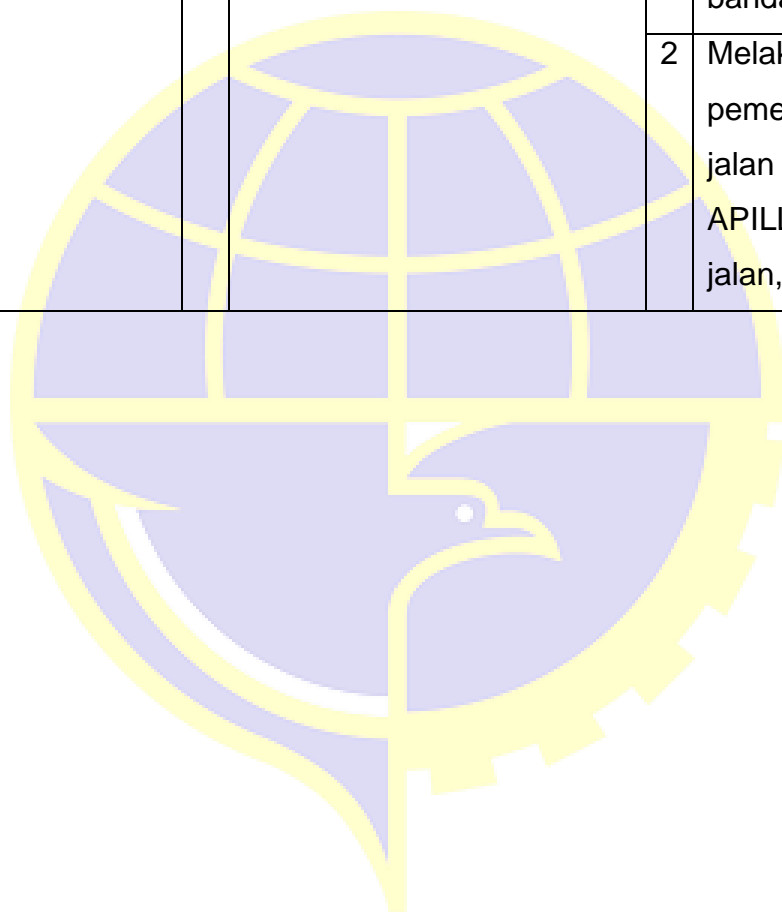
5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan sesuai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam mendukung kebijakan dan program Walikota Singkawang dalam perencanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Dinas Perhubungan perlu menyusun strategi perencanaan jangka menengah dengan menggunakan **SWOT/Metode Perencanaan Strategis** yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Tabel 5.2.1
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

VISI	: SINGKAWANG HEBAT 2022					
MISI 4	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	1	Meningkatnya kapabilitas aparatur daerah;	1	Melakukan Pendidikan dan pelatihan aparatur daerah	1	.
					2	Melaksanakan kerjasama dengan penyelenggaraan pendidikan dan latihan perhubungan.
					3	
Misi 6	Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.	1	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	1	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur perkotaan.	1	Melaksanakan Pembangunan/Peningkatan prasarana transportasi (terminal, pelabuhan, dermaga dan bandara) yang terintegrasi.
					2	Menyediakan fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, APILL, alat penerangan jalan, dll).
					3	Meningkatkan prasarana pendukung transportasi (taman parkir, halte, UPT PKB, dll).
					4	Meningkatkan pelayanan angkutan umum sesuai dengan kewenangan.

				5	Menyiapkan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi dibidang perhubungan.	
			2	Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perkotaan.	1	Melaksanakan pemeliharaan prasarana transportasi (terminal, pelabuhan, dermaga dan bandara) yang terintegrasi.
					2	Melaksanakan pemeliharaan keselamatan jalan (rambu, marka, APILL, alat penerangan jalan, dll).



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Singkawang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatannya:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e. Penyediaan alat tulis kantor;
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- i. Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan;
- j. Penyediaan makanan dan minuman;
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan pelayanan administrasi keuangan;

- m. Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatannya:
- a. Pembangunan gedung kantor;
 - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - e. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
Kegiatannya :
- a. Pengadaan pakaian kerja lapangan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - c. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
 - d. Penyusunan laporan rencana kerja SKPD;
5. Program penguatan transparansi publik;
Kegiatannya :
- a. Expo kinerja SKPD;
 - b. Peringatan HUT perhubungan nasional;
 - c. Peringatan hari besar nasional dan daerah;
 - d. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas;
6. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Kegiatannya:
- a. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - b. Pelaksanaan pengadaan tanah bandar udara;
 - c. Pengembangan sistem informasi/databased perhubungan darat;

- d. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana jalan umum;
 - e. Pembangunan prasarana dan fasilitas ASDP.
7. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- Kegiatannya:
- a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light;
 - d. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas;
 - e. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana keselamatan pelayaran;
 - f. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
 - g. Rehabilitasi/pemeliharaan alat pemantau lalu lintas/ATCS;
 - h. Revitalisasi/sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat.
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Kegiatannya :
- a. Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan;
 - c. Fasilitas perijinan di bidang perhubungan;
 - d. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
 - e. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas;
 - f. Pembinaan pengelolaan perparkiran;
 - g. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan perparkiran;
 - h. Pelayanan shuttle bus;
 - i. Peningkatan penerimaan retribusi jasa pelabuhan;

- j. Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum;
- k. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas ASDP;
- l. Manajemen keselamatan angkutan umum.

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kegiatannya :

- a. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal;
- b. Pembangunan taman parkir (lanjutan);
- c. Fasilitasi pengamanan dan pengawalan pembangunan prasarana perhubungan;
- d. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan pengadaan tanah bandar udara;
- g. Pengembangan sistem informasi/databased perhubungan darat;
- h. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik bidang LLAJ;
- i. Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana jalan umum;
- j. Pelaksanaan peresmian groundbreaking/ peletakan batu pertama;
- k. Pembangunan bandar udara baru.

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatannya :

- a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
- b. Pengadaan marka jalan;
- c. Pengadaan pagar pengaman jalan;
- d. Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Traffic Light/Warning Light;
- e. Pengadaan Rambu Papan Penunjuk Jurusan (RPPJ);
- f. Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
- g. Pengadaan jalur sepeda;

- h. Pengadaan paku jalan;
 - i. Analisis kebutuhan lalu lintas;
 - j. Analisis dampak lalu lintas;
 - k. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - l. Peningkatan kepatuhan dan budaya berlalu lintas;
 - m. Pengamanan dan pengaturan Car Free Day;
 - n. Kegiatan Penciptaan pelayanan cepat, tepat, dan murah.
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Kegiatannya :
- a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor;
 - d. Pengadaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor;
 - e. Pengembangan/peningkatan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB) lanjutan;
 - f. Sosialisasi/penyuluhan pelaksanaan uji berkala/laik jalan pada pengusaha angkutan dan pemilik kendaraan bermotor;
 - g. Pelaksanaan ram check di terminal pada kendaraan bus/penumpang umum.
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.
13. Perogram Penataan Kelembagaan dan Organisasi
- a. Penyusunan evaluasi jabatan pemerintah Kota Singkawang.

(Tabel 6.1 dapat dilihat dalam Daftar Terlampir)

6.2 Kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan adalah :

- a. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
- b. Pelaku usaha bidang transportasi;
- c. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

6.3 Pendanaan

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun.

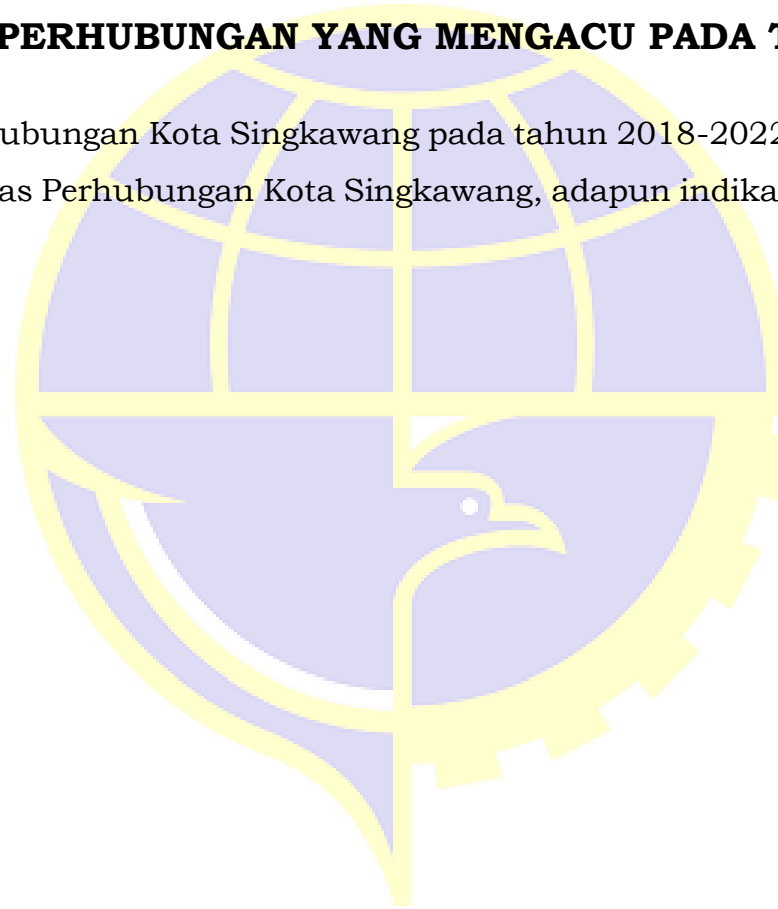
Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kota Singkawang;
2. APBD Propinsi Kalimantan Barat;
3. APBN
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan;
5. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll)

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun 2018-2022 dibagi ke dalam berdasarkan masing-masing urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan Kota Singkawang, adapun indikator-indikator tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 7.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA SINGKAWANG

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	103,300	400,000	450,000	500,000	550,000	600,000	600,000
2	Rasio ijin trayek	0,0005	0,0002	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0006
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	355	420	440	460	480	500	500
4	a. Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2	2	2
5	b. Jumlah Terminal Bis	2	2	3	3	3	3	3
6	c. Jumlah Bandar Udara	-	-	-	-	-	1	1
7	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,052	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	70,85	95	95	100	100	100	100

9	Pemasangan rambu-rambu (%)	87,16	90	92,50	95	97,50	100	100
10	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0711	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
11	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	40.583	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	140.000
12	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (ton)	7.469	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
13	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	40.583	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	140.000

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Rencana Strategis Dinas Perhubungan diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Dokumen renstra Dinas Perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen renstra Dinas Perhubungan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan RPJMD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Singkawang, 07 Juni 2018
Kepala Dinas Perhubungan



Drs.SUMASTRO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 198603 1 003



**Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan**

	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PENYEDIAAN JASA																	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	3,393,500	1,411,500	750,000	1,674,870	1,674,830	2,042,500	84.27%	44.78%	99.99%	99.99%	60.19%	19.30%	9.68%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	179,454,672	163,254,672	179,454,672	222,300,000	2,591,900,000	92,242,309	120,002,721	173,839,267	184,434,028	2,512,802,628	51.40%	73.51%	96.87%	82.97%	96.95%	94.95%	128.46%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20,600,000	23,100,000	18,500,000	65,340,000	16,760,000	3,932,800	7,896,200	7,968,100	54,896,500	15,274,600	19.09%	34.18%	43.07%	84.02%	91.14%	-5.03%	40.38%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5,671,600	5,671,600	8,675,900	8,675,900	25,050,250	5,670,900	5,671,600	8,675,900	8,675,900	25,040,750	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	99.96%	44.97%	44.96%
5	Penyediaan jasa alat tulis kantor	57,183,000	49,000,000	73,636,640	59,789,640	59,789,050	57,182,900	49,000,000	73,635,920	59,536,940	59,789,050	100.00%	100.00%	100.00%	99.58%	100.00%	1.12%	1.12%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	68,717,300	62,768,800	139,584,550	161,762,550	149,801,275	68,717,175	62,768,800	139,242,050	161,037,550	145,803,775	100.00%	100.00%	99.75%	99.55%	97.33%	21.51%	20.69%
7	Penyediaan barang komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	27,381,520	32,605,500	2,405,500	100,290,300	47,014,800	27,381,095	32,597,650	2,405,500	100,118,800	46,384,500	100.00%	99.98%	100.00%	99.83%	98.66%	14.47%	14.09%
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	83,198,000	138,015,000	150,363,000	1,081,992,720	472,084,000	83,092,750	136,855,000	150,085,000	1,059,042,600	452,577,750	99.87%	99.16%	99.82%	97.88%	95.87%	54.34%	52.77%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	2,460,000	2,485,000	2,920,000	2,220,000	3,370,000	68.33%	69.03%	81.11%	61.67%	93.61%	0.00%	8.19%
10	Penyediaan makanan dan minuman	26,190,000	26,190,000	45,200,000	45,620,000	45,620,000	26,186,500	26,180,000	44,826,500	45,571,000	45,315,500	99.99%	99.96%	99.17%	99.89%	99.33%	14.88%	14.69%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	551,068,700	300,000,000	607,544,300	806,250,000	602,087,425	518,075,275	295,614,600	606,845,693	784,536,445	600,524,188	94.01%	98.54%	99.89%	97.31%	99.74%	2.24%	3.76%
12	Penyediaan pelayanan administrasi keuangan	58,500,000	60,000,000	96,000,000	100,000,000	130,000,000	47,870,000	59,560,000	93,380,000	95,500,000	127,425,000	81.83%	99.27%	97.27%	95.50%	98.02%	22.09%	27.73%
13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis	51,600,000	66,000,000	92,295,720	102,200,000	307,060,800	51,600,000	66,000,000	85,600,000	102,200,000	276,094,580	100.00%	100.00%	92.75%	100.00%	89.92%	56.19%	52.09%
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
14	Pembangunan gedung kantor	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	149,450,000	0	0	0	0	99.63%	0	0
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	30,000,000	-	65,400,000	62,500,000	-	29,053,000	-	56,352,300	60,952,000	0	96.84%	0	86.17%	97.52%	0	0
16	Pengadaan tanah	-	1,185,260,800	-	-	-	-	1,027,057,850	-	-	-	0	86.65%	0	0	0	0	0
17	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	139,840,000	171,354,500	204,000,000	254,000,000	234,000,000	139,828,150	169,237,000	203,938,350	253,800,600	233,978,000	99.99%	98.76%	99.97%	99.92%	99.99%	13.74%	13.74%
18	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	16,700,000	16,700,000	38,690,000	38,690,000	31,500,000	16,700,000	16,600,000	38,675,000	38,665,000	31,432,500	100.00%	99.40%	99.96%	99.94%	99.79%	17.19%	17.13%
19	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	29,800,000	0	0	0	0	99.33%	0	0
	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	75,000,000	21,320,000	90,100,000	54,500,000	-	74,780,000	21,320,000	90,047,000	54,360,000	0	99.71%	100.00%	99.94%	99.74%	0	0
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	3,943,200	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	98.58%	100.00%	100.00%	100.00%	0	0
22	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0	0
	PENGUATAN TRANSPARANSI PUBLIK																	
23	Expo Kinerja SKPD	4,600,000	4,600,000	5,000,000	7,000,000	20,000,000	4,600,000	4,600,000	5,000,000	6,600,000	20,000,000	100.00%	100.00%	100.00%	94.29%	100.00%	44.40%	44.40%
	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN																	
24	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	7,600,000	7,175,000	-	-	-	6,112,500	7,175,000	-	-	-	80.43%	100.00%	0	0	0	-100.00%	-100.00%
25	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	-	91,620,800	730,000,000	605,455,200	356,668,410	-	-	275,521,000	600,928,700	354,608,800	0	0	37.74%	99.25%	99.42%	0	0
26	Pelaksanaan pengadaan tanah pelabuhan	-	-	372,225,300	-	-	-	-	372,225,050	-	-	0	0	100.00%	0	0	0	0
27	Pengadaan tanah untuk lahan parkir	-	-	14,200,000,000	-	-	-	-	12,100,266,000	-	-	0	0	85.21%	0	0	0	0
28	Pengadaan tanah terminal pangmilang	-	-	1,600,000,000	-	-	-	-	1,558,967,000	-	-	0	0	97.44%	0	0	0	0
29	Pelaksanaan pengadaan tanah jaringan listrik	-	-	-	3,250,000	-	-	-	-	3,247,700	-	0	0	0	99.93%	0	0	0
30	Pelaksanaan pengadaan tanah bandar udara	-	-	-	389,000,000	3,232,397,175	-	-	-	93,119,995	680,022,400	0	0	0	23.94%	21.04%	0	0
	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ																	
31	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	81,143,180	25,587,000	66,627,000	191,427,000	174,927,000	80,536,500	25,582,300	57,237,600	181,941,000	134,692,500	99.25%	99.98%	85.91%	95.04%	77.00%	21.17%	13.72%
32	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	-	-	198,250,000	-	81,750,000	-	-	197,500,000	-	80,118,000	0.00%	0.00%	99.62%	0.00%	98.00%	0.00%	0.00%
33	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	66,600,000	25,000,000	41,870,000	-	-	66,070,000	24,775,000	41,419,300	-	-	99.20%	99.10%	98.92%	0.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%
34	Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light	138,000,000	338,000,000	138,000,000	199,995,700	151,183,200	137,815,000	336,385,000	137,714,000	199,925,700	151,147,300	99.87%	99.52%	99.79%	99.96%	99.98%	2.31%	2.34%
35	Rehabilitasi / pemeliharaan rambu lalu lintas	-	-	72,000,000	148,000,000	101,065,400	-	-	71,812,000	147,413,500	100,709,400	0	0	99.74%	99.60%	99.65%	0.00%	0.00%
36	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana keselamatan pelayaran	-	-	-	145,258,350	118,927,650	-	-	-	144,357,850	118,014,650	0	0	0	99.38%	99.23%	0.00%	0.00%
	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN																	
37	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	-	-	-	20,756,800	24,334,675	-	-	-	17,011,800	21,784,675	0	0	0	81.96%	89.52%	0	0
38	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	-	-	-	29,602,800	42,958,000	-	-	-	29,102,800	40,858,000	0	0	0	98.31%	95.11%	0	0
39	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	53,331,500	-	7,400,000	-	-	53,139,500	-	7,400,000	-	-	99.64%	0	100.00%	0	0	-100.00%	-100.00%
40	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	20,500,000	11,000,000	70,130,000	12,265,500	22,265,400	20,500,000	11,000,000	66,550,000	9,665,500	20,837,100	100.00%	100.00%	94.90%	78.80%	93.59%	2.09%	0.41%
41	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	-	-	-	-	43,487,275	-	-	-	-	42,402,275	0	0	0	97.51%	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	-	-	110,000,000	103,766,000	459,012,275	-	-	100,750,000	102,151,650	458,112,275	0	0	91.59%	98.44%	99.80%	0	0
43	Fasilitas perijinan di bidang perhubungan	-	-	-	11,387,800	9,253,400	-	-	-	11,387,800	9,124,400	0	0	0	100.00%	98.61%	0	0
44	Sosialisasi/penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan	-	-	-	22,958,800	23,678,800	-	-	-	22,208,800	20,035,800	0	0	0	96.73%	84.61%	0	0
45	Pengamanan dan pengaturan lalu lintas	17,000,000	27,400,000	33,750,000	96,442,800	132,587,000	17,000,000	27,400,000	33,750,000	93,762,800	132,575,000	100.00%	100.00%	100.00%	97.22%	99.99%	67.11%	67.11%
46	Peningkatan pengelolaan perparkiran	62,225,000	120,385,250	15,637,250	70,149,800	144,163,000	60,525,000	117,547,750	15,637,250	37,339,800	141,813,000	97.27%	97.64%	100.00%	53.23%	98.37%	23.37%	23.72%
47	Pelayanan Shuttle Bus	-	-	42,600,000	61,852,800	89,892,000	-	-	40,720,000	41,452,800	87,092,000	0	0	95.59%	67.02%	96.89%	0	0
48	Peningkatan penerimaan retribusi jasa pelabuhan	-	-	-	11,875,700	9,786,000	-	-	-	9,191,700	9,676,000	0	0	0	77.40%	98.88%	0	0
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN																		
49	Pematokan ulang BM Pergeseran Runway Bandar Udara Baru Singkawang dan Land Clearing	-	-	261,000,000	180,000,000	53,750,000	-	-	15,967,000	-	43,809,050	0	0	6.12%	0.00%	81.51%	0	0
50	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	-	-	-	50,000,000	100,896,600	-	-	-	47,932,607	100,792,600	0	0	0	95.87%	99.90%	0	0
51	Pembangunan taman parkir	-	-	-	1,100,996,400	1,000,000,000	-	-	-	1,092,867,800	995,364,600	0	0	0	99.26%	99.54%	0	0
52	Fasilitas pengamanan dan pengawalan pembangunan prasarana perhubungan	-	-	-	-	42,850,000	-	-	-	-	34,997,100	0	0	0	0	81.67%	0	0
PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS																		
53	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	161,743,320	245,927,500	247,352,900	44,000,000	56,064,425	161,513,500	245,319,500	246,177,000	44,000,000	55,064,425	99.86%	99.75%	99.52%	100.00%	98.22%	-23.27%	-23.59%
54	pengadaan marka jalan	26,366,000	237,760,000	196,199,100	99,000,000	100,896,600	26,350,000	236,777,000	195,963,000	98,540,000	99,696,600	99.94%	99.59%	99.88%	99.54%	98.81%	39.86%	39.47%
55	pengadaan pagar pengaman jalan	84,500,000	346,400,000	-	-	-	84,382,000	345,535,000	-	-	-	99.86%	99.75%	0	0	0	-100.00%	-100.00%
56	Pengadaan APILL/TRAFFIC LIGHT	129,800,000	192,834,000	163,461,000	-	-	129,561,000	192,316,000	163,115,000	-	-	99.82%	99.73%	99.79%	0	0	-100.00%	-100.00%
57	Pengadaan Rambu Papan Petunjuk Jurusan (RPPJ)	-	-	-	26,400,000	132,969,200	-	-	-	26,300,000	132,164,200	0	0	0	99.62%	99.39%	0	0
58	Pengadaan Cermin Tikungan (Convex Mirror)	-	-	-	48,600,000	-	-	-	-	48,600,000	-	0	0	0	100.00%	0	0	0
PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR																		
59	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	-	125,000,000	-	-	-	-	119,685,000	0	0	0	0	95.75%	0	0
60	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	16,443,000	21,600,000	213,200,000	391,101,000	-	16,443,000	21,600,000	181,190,000	333,131,000	-	100.00%	100.00%	84.99%	85.18%	0	-100.00%	-100.00%
61	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	-	-	-	12,676,600	15,680,000	-	-	-	12,676,600	15,480,000	0	0	0	100.00%	98.72%	0	0
62	Pengadaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	221,300,000	99,661,700	-	-	-	220,300,000	66,612,800	0	0	0	99.55%	66.84%	0	0
63	Pengembangan sistem informasi/database pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	129,768,000	0	0	0	0	86.51%	0	0
REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DAERAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH																		
64	Revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	149,712,000	0	0	0	0	99.81%	0	0
PENDIDIKAN KEDINASAN																		
65	Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	-	-	-	314,000,000	199,449,600	-	-	-	300,080,000	198,265,444	0	0	0	95.57%	99.41%	0	0
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN MEDIA MASA																		
66	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	60,681,700	46,681,700	43,531,700	44,437,100	-	60,681,700	46,681,700	42,931,700	44,437,100	-	100.00%	100.00%	98.62%	100.00%	0	-100.00%	-100.00%
67	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	5,519,400	5,519,400	5,519,400	5,519,400	-	5,519,400	5,519,400	5,519,400	5,519,400	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0	-100.00%	-100.00%
68	Pengadaan sistem pengendalian menara telekomunikasi	-	-	296,000,000	-	-	-	-	288,052,000	-	-	0	0	97.31%	0	0	0	0
69	Pembinaan dan pengembangan sumber daya jasa titipan	-	-	-	11,937,900	-	-	-	-	11,937,900	-	0	0	0	100.00%	0	0	0
70	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat komunikasi informasi dan media massa	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	75,950,000	-	0	0	0	94.94%	0	0	0
FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI																		
71	Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi	-	-	-	63,255,000	-	-	-	-	62,805,000	-	0	0	0	99.29%	0	0	0
KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA																		
72	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	8,244,500	8,244,500	8,244,500	112,015,000	-	8,244,500	8,244,500	8,244,500	109,903,400	-	100.00%	100.00%	100.00%	98.11%	0	-100.00%	-100.00%
73	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	35,252,561	22,937,000	22,940,000	98,800,000	-	34,932,561	22,737,000	22,940,000	98,750,000	-	99.09%	99.13%	100.00%	99.95%	0	-100.00%	-100.00%
74	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	53,988,300	53,988,300	53,988,300	57,588,300	-	53,988,300	53,988,300	53,988,300	57,588,300	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0	-100.00%	-100.00%
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERHUBUNGAN																		
75	Analisis kebutuhan lalu lintas	-	-	-	-	18,778,000	-	-	-	-	17,928,000	0	0	0	0	95.47%	0	0
76	Manajemen dan rekayasa lalu lintas	-	-	-	-	18,974,600	-	-	-	-	18,124,600	0	0	0	0	95.52%	0	0
77	Analisis dampak lalu lintas	-	-	-	-	23,588,000	-	-	-	-	17,838,000	0	0	0	0	75.62%	0	0

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN																		
78	Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana penerangan jalan dan fasilitas umum	-	-	-	-	276,000,000	-	-	-	-	275,107,500	0	0	0	0	99.68%	0	0
79	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan dan fasilitas umum	-	-	-	-	4,601,000,000	-	-	-	-	4,477,091,627	0	0	0	0	97.31%	0	0

**TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Renstra P	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN				19,227,759,300		24,413,600,000		22,268,140,000		24,599,720,000		26,501,740,000		
		2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				18,995,517,700		24,304,845,000		22,160,890,000		24,592,220,000		26,494,240,000		
		2.09.	PERHUBUNGAN				18,995,517,700		24,304,845,000		22,160,890,000		24,592,220,000		26,494,240,000		
Meningkatkan tata kelola administrasi	Mengelola Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran	2.09.2.09.01.001.	1	Penyediaan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan administrasi perkantoran		4,272,435,950		4,307,880,000		4,370,040,000		4,458,440,000		4,549,120,000		
			-	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100%	100%	3,400,000	100%	3,400,000	100%	3,400,000	100%	3,400,000	100%	3,400,000	500%
			-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	100%	2,654,100,000	100%	2,850,000,000	100%	2,878,588,000	100%	2,899,175,295	100%	2,949,175,295	500%
			-	penyediaan jasa pemeliharaan dan pezinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan pezinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%	100%	21,612,350	100%	21,612,400	100%	21,612,400	100%	21,612,400	100%	21,612,400	500%
			-	penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan	100%	100%	25,081,000	100%	25,081,000	100%	25,081,000	100%	25,081,000	100%	25,081,000	500%
			-	penyediaan alat tulis kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	100%	100%	59,830,300	100%	59,830,300	100%	59,830,300	100%	59,830,300	100%	59,830,300	500%
			-	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	106,549,500	100%	104,211,005	100%	104,211,005	100%	104,211,005	100%	104,211,005	500%
			-	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	18,292,800	100%	18,300,000	100%	18,300,000	100%	18,300,000	100%	18,300,000	500%
			-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	164,450,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	500%
			-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	3,840,000	100%	3,840,000	100%	3,840,000	100%	3,840,000	100%	3,840,000	500%
			-	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan makanan dan minuman yang disediakan	100%	100%	45,620,000	100%	46,000,000	100%	46,000,000	100%	46,000,000	100%	46,000,000	500%
			-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	100%	100%	560,200,000	100%	448,615,295	100%	482,187,295	100%	550,000,000	100%	565,680,000	500%
			-	Penyediaan pelayanan administrasi keuangan	Cakupan pelayanan administrasi keuangan yang disediakan	100%	100%	141,700,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	500%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			-	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	Cakupan jasa pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	100%	100%	467,760,000	100%	446,990,000	100%	446,990,000	100%	446,990,000	100%	446,990,000	500%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.09.2.09.0 1.002.	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			485,700,000		495,410,000		545,820,000		557,430,000		525,740,000	
			- Pembangunan gedung kantor	Gedung kantor yang dibangun	1 Paket	1 Paket	161,700,000	1 Paket	148,960,000	1 Paket	161,700,000	1 Paket	161,700,000	1 Paket	161,700,000	5 paket
			- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-	-	1 Unit sepeda motor dan 1 mobil patwal	32,450,000	-	-	-	-	-	-	1 Unit sepeda motor dan 1 mobil patwal
			- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	100%	253,500,000	100%	253,500,000	100%	273,120,000	100%	283,230,000	100%	293,540,000	500%
			- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	40,500,000	100%	40,500,000	100%	40,500,000	100%	40,500,000	100%	40,500,000	500%
			- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Cakupan gedung kantor yang direhabilitasi	100%	100%	30,000,000	100%	20,000,000	100%	70,500,000	100%	72,000,000	100%	30,000,000	500%
		2.09.2.09.0 1.003	3 Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			91,200,000		-	90 setel	91,500,000	-	-	90 setel	91,800,000	330 setel
			- Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	50 setel	70 setel	91,200,000	-	-	90 setel	91,500,000	-	-	90 setel	91,800,000	330 setel
	Megelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	2.09.2.09.0 1.006.	4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat laporan kinerja dinas perhubungan Kota Singkawang			12,000,000		10,000,000		19,500,000		19,500,000		19,500,000	
			- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	6,500,000	1 Dokumen	6,500,000	1 Dokumen	6,500,000	5 Dokumen
			- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	6,500,000	1 Dokumen	6,500,000	1 Dokumen	6,500,000	5 Dokumen
			- Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen laporan Renstra SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
			- Penyusunan laporan rencana kerja SKPD	Dokumen laporan rencana kerja SKPD	-	-	-	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	6,500,000	1 Dokumen	6,500,000	1 Dokumen	6,500,000	4 Dokumen
		2.09.2.09.0 1.007.	5 Program Penguatan Transparansi Publik	Terpenuhinya kinerja perangkat daerah			148,200,000		70,100,000		95,200,000		95,500,000		142,000,000	
			- Expo Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan expo kinerja perangkat daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	18,600,000	1 kegiatan	10,000,000	1 kegiatan	20,200,000	1 kegiatan	20,500,000	1 kegiatan	25,000,000	5 kegiatan
			- Peringatan HUT Perhubungan Nasional	jumlah kegiatan pada peringatan HUT Perhubungan Nasional	-	1 kegiatan	129,600,000	1 Kegiatan	5,100,000	-	-	-	-	2 Kegiatan	42,000,000	4 Kegiatan
			- Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah kegiatan pada peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	-	-	-	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	4 Kegiatan
			- Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	-	-	-	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	4 Kegiatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Memperkecil disparitas antar wilayah dan sektor kota Singkawang agar setiap wilayah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperoleh pemerataan manfaat pembangunan	Meningkatkan daya saing daerah demi mempercepat ketangguhan dan ketahanan kota	2.09.2.09.0 1.015	6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Prasarana Perhubungan Yang Dibangun/ Ditingkatkan (Unit)	4													
			-	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3 Dokumen												3 Dokumen	
			-	Pelaksanaan pengadaan tanah bandar udara	Tercapainya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam pembangunan bandar udara	50 Ha													
			-	Pengembangan sistem informasi/databased perhubungan darat	Terpenuhiya sistem informasi/databased perhubungan darat	-													
			-	Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana jalan umum	Upaya menunjang peningkatan mutu pelayanan penyediaan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Singkawang	1567 Titik													
Meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi	2.09.2.09.0 1.016	7	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (%)			1,911,596,300		1,949,830,000		2,262,830,000		2,102,610,000		2,143,180,000			
			-	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	125,477,000	100%	125,477,000	100%	125,477,000	100%	125,477,000	100%	125,477,000	100%	125,477,000	500%
			-	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	1 Paket	200,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Paket
			-	Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light	Persentase traffic light dan warning light yang dipelihara	100%	100%	151,097,600	100%	151,097,600	100%	151,097,600	100%	151,097,600	100%	151,097,600	100%	151,097,600	500%
			-	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas	Persentase rambu lalu lintas dan RPPJ yang dipelihara	100%	100%	100,993,900	100%	100,993,900	100%	100,993,900	100%	100,993,900	100%	100,993,900	100%	100,993,900	500%
			-	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana keselamatan pelayaran	Jumlah lokasi sarana keselamatan pelayaran yang dipelihara	1 Lokasi	1 Lokasi	224,827,650	1 Lokasi	124,827,650	1 Lokasi	224,827,650	1 Lokasi	224,827,650	1 Lokasi	224,827,650	1 Lokasi	224,827,650	5 Lokasi
			-	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum	Terpeliharanya sarana dan prasarana penerangan jalan umum	4446 Titik	291 Titik	1,309,200,150	472	1,309,200,150	560 Titik	1,309,200,150	562 Titik	1,309,200,150	597 Titik	1,309,200,150	597 Titik	1,309,200,150	2516 Titik
			-	Rehabilitasi/pemeliharaan alat pemantau lalu lintas/ATCS	Cakupan alat pemantau lalu lintas yang terpelihara	-	-	-	-	-	100%	74,000,000	100%	74,000,000	100%	74,000,000	100%	74,000,000	300%
			-	Revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan revitalisasi fasilitas terminal	-	-	-	1 Kegiatan	138,233,700	1 Kegiatan	77,233,700	1 Kegiatan	117,013,700	1 Kegiatan	157,583,700	1 Kegiatan	157,583,700	4 Kegiatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan pelayanan pengembangan dibidang perhubungan	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan angkutan	2.09.2.09.01.017	8 Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan			1,290,916,575		1,355,460,000		1,498,230,000		2,569,390,000		2,694,110,000	
			- Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	Terlaksananya patroli pengawasan (gabungan)	12 Bulan	12 Bulan	22,215,400	12 Bulan	40,000,000	6 Kali	40,000,000	6 Kali	85,000,000	6 Kali	85,000,000	24 Bulan
			- Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terselenggaranya operasional pelayanan pelabuhan	1 Lokasi	1 Lokasi	463,012,275	1 Lokasi	480,000,000	1 Lokasi	480,000,000	1 Lokasi	650,000,000	1 Lokasi	650,000,000	2 Lokasi
			- Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Jumlah izin yang dikeluarkan untuk kapal < 7 GT	200 izin	160 izin	9,169,400	160 izin	-	175 izin	-	200 izin	35,000,000	225 izin	35,000,000	160 izin
			- Sosialisasi/penyuluhan ketrampilan lalu lintas dan angkutan	Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan budaya tertib dan teratur serta keselamatan berlalu lintas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45,000,000	1 Kegiatan	60,101,000	1 Kegiatan	60,101,000	1 Kegiatan	185,000,000	1 Kegiatan	185,000,000	5 Kegiatan
			- Pengamanan dan pengaturan lalu lintas	Terlaksananya patroli, pengawalan dan pengamanan serta pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan	12 Bulan	12 Bulan	187,000,000	12 Bulan	187,000,000	12 Bulan	187,000,000	12 Bulan	456,390,000	12 Bulan	456,390,000	60 Bulan
			- Pembinaan pengelolaan perparkiran	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perparkiran	12 Bulan	12 Bulan	256,750,000	12 Bulan	232,759,000	12 Bulan	232,759,000	12 Bulan	400,000,000	12 Bulan	524,720,000	60 Bulan
			- Peningkatan pelayanan penyelenggaraan perparkiran	Terlaksananya Peningkatan pelayanan perparkiran	-	-	-	-	-	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	75,000,000	36 bulan
			- Pelaksanaan shuttle bus	Terlaksananya pelayanan angkutan Penumpang Umum, Pelajar dan Wisata	12 Bulan	12 Bulan	92,000,000	12 Bulan	56,600,000	12 Bulan	56,600,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	60 Bulan
			- Peningkatan penerimaan retribusi jasa pelabuhan	Meningkatnya penerimaan retribusi dari sektor pelabuhan	15%	15%	17,286,000	15%	18,000,000	15%	18,000,000	15%	35,000,000	15%	35,000,000	30%
			- Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum	Terselenggaranya Angkutan Umum penumpang dan barang	12 Bulan	12 Bulan	87,250,000	12 Bulan	90,000,000	12 Bulan	90,000,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	150,000,000	60 Bulan
			- Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas ASDP	Tersedianya Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas ASDP	1 Dokumen	1 Dokumen	111,233,500	1 Dokumen	113,000,000	1 Dokumen	113,000,000	1 Dokumen	178,000,000	1 Dokumen	178,000,000	1 dokumen
			- Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Terselenggaranya Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	-	-	-	12 bulan	78,000,000	12 bulan	145,770,000	12 bulan	220,000,000	12 bulan	220,000,000	48 bulan
Terlaksananya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan efisien	2.09.2.09.01.018.	9 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah Prasarana Perhubungan Yang Dibangun/ Ditingkatkan (Unit)			8,958,963,675		14,758,960,000		11,724,860,000		13,150,350,000		14,870,390,000		
		- Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah halte yang akan dibangun	2 Unit	1 Unit	56,457,550	1 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	8 Unit	
		- Pembangunan taman parkir (lanjutan)	Terlaksananya pembangunan fasilitas taman parkir untuk umum	-	1 Lokasi	337,600,000	1 Lokasi (Lanjutan)	510,000,000	1 Lokasi (Lanjutan)	600,000,000	1 Lokasi (Lanjutan)	1,000,000,000	1 Lokasi (Lanjutan)	1,900,000,000	1 Lokasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Fasilitas pengamanan dan pengawalan pembangunan prasarana perhubungan	Tersedianya advis hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah bandara	-	1 Kegiatan	53,158,250	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	5 kegiatan
			- Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3 Dokumen	2 Dokumen	1,158,096,750	1 dokumen	1,000,000,000	1 dokumen	435,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	300,000,000	6 dokumen
			- Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersusunnya norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	-	-	-	-	-	1 Perda/Perwako	250,000,000	1 Perda/Perwako	250,000,000	-	-	2 Perda/perwako
			- Pelaksanaan pengadaan tanah bandar udara	Terlaksananya pengadaan tanah bandar udara	50 Ha	75 Ha	7,090,509,025	76 Ha	7,256,975,000	0,25 Ha	500,000,000	0,2 Ha	400,000,000	-	-	151,45 Ha
			- Pengembangan sistem informasi/databased perhubungan darat	Terwujudnya sistem informasi/databased perhubungan darat	-	1 Dokumen	51,542,100	1 Dokumen	225,000,000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen
			- Pengembangan sistem informasi pelayanan publik bidang LLAJ	Terwujudnya sistem pusat manajemen lau lintas dan transportasi darat (ATCS)	-	-	-	1 Paket	275,500,000	1 Paket (Lanjutan)	270,000,000	1 Paket (Lanjutan)	280,000,000	1 Paket (Lanjutan)	195,000,000	1 Paket
			- Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana jalan umum	Jumlah Pengembangan/Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum	1567 Titik	78 Titik	211,600,000	242 Titik	4,928,460,000	149 Titik	8,754,860,000	162 Titik	9,875,350,000	207 Titik	11,680,390,000	838 Titik
			- Pelaksanaan Persemin Groundbreaking / Peletakan Batu Pertama	Terselenggaranya pelaksanaan peresmian groundbreaking / peletakan batu pertama	-	-	-	1 kegiatan	150,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan
			- Pembangunan bandar udara baru	Terlaksananya pembangunan bandar udara baru Kota Singkawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- pembuatan saluran pembatas areal lahan bandara	Terlaksananya pembuatan saluran pembatas areal lahan bandara	-	-	-	-	-	1 kegiatan	420,000,000	1 kegiatan	350,000,000	1 kegiatan	300,000,000	3 Kegiatan
			- Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Investasi (KPBU) Bandar Udara Baru Kota Singkawang	Terlaksananya kegiatan pendukung investasi (KPBU) Bandar Udara Baru Kota Singkawang	-	-	-	2 Kegiatan	243,025,000	2 Kegiatan	245,000,000	2 Kegiatan	245,000,000	2 Kegiatan	245,000,000	8 kegiatan
Meningkatkan keamanan lalu lintas	Meningkatnya ketersediaan fasilitas Perengkapan jalan	2.09.2.09.01.019.	10 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase Pengurangan Pelanggaran Lalu Lintas			334,196,350		754,210,000		706,820,000		742,110,000		779,170,000	
			- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu terpasang, jumlah marka yang terpasang	480 buah	50 buah rambu lalu	50,165,000	50 buah	50,165,000	100 buah	101,000,000	80 buah	80,034,100	80 buah	80,034,100	360 buah
			- Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan terpasang, zebra cross terpasang, pita pengaduh terpasang	448 M2	837,788 M2	150,785,900	444,69 M2	80,045,000	837,69 M2	150,785,900	1.033,755 M2	186,075,900	837,788 M2	150,785,900	3991,55 M2
			- Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah pagar pengaman jalan (guardrall) yang terpasang	310 meter	-	-	-	-	-	-	100 meter	180,000,000	-	-	100 meter
			- Pengadaan APILL/Traffic Light/Warning Light	Jumlah traffic light/warning light yang terpasang	6 unit traffic light, 11 warning light	-	-	1 Unit Traffic Light	134,000,000	-	-	-	-	-	-	1 unit traffic light

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Tersedianya Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang terpasang	10 buah RPPJ	10 buah RPPJ	133,245,450	5 buah RPPJ	82,000,000	5 buah RPPJ	82,000,000	5 buah RPPJ	82,000,000	5 buah RPPJ	82,000,000	30 buah RPPJ
			- Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi ZOSS yang terpasang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	252,350,000	2 Paket
			- Pengadaan jalur sepeda	Jumlah jalur sepeda yang terpasang	-	-	-	-	-	1 Paket	159,034,100	-	-	-	-	1 Paket
			- Pengadaan paku jalan	Jumlah paku jalan yang terpasang	225 buah	-	-	315 buah	100,000,000	300 buah	-	300 buah	-	300 buah	-	1215 buah
			- Analisis Kebutuhan Lalu Lintas	Tersedianya data kebutuhan lalu lintas	-	-	-	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	87,000,000	1 Dokumen	87,000,000	3 Dokumen	87,000,000	12 Kegiatan
			- Analisis dampak lalu lintas	Terlaksananya Analisis dampak lalu lintas	-	-	-	3 Dokumen	49,000,000	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen
			- Manajemen dan rekayasa lalu lintas	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa lalu lintas	-	-	-	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	52,000,000	12 Bulan	52,000,000	12 Bulan	52,000,000	48 bulan
			- Peningkatan kepatuhan dan budaya berlalu lintas	Terlaksananya Peningkatan kepatuhan dan budaya berlalu lintas	-	-	-	2 kegiatan	34,000,000	-	-	-	-	-	-	2 kegiatan
			- Pengamanan dan pengaturan Car Free Day	Terlaksananya Pengamanan dan pengaturan Car Free Day	-	-	-	12 bulan	150,000,000	12 bulan	75,000,000	12 bulan	75,000,000	12 bulan	75,000,000	48 bulan
			- Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah, dan Murah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya pengadaan fasilitas sarana balai pengujian kendaraan bermotor	2.09.2.09.01.020.	11 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Laik Jalan			558,808,850		602,995,000		846,090,000		896,890,000		679,230,000	
			- Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	1 Paket	1 Paket	397,975,000	1 Paket	261,000,000	1 Paket	397,975,000	1 Paket	397,975,000	1 Paket	430,315,000	5 Paket
			- Pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	1 Paket	160,250,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket		4 Paket
			- Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor	6 kali	6 kali	16,245,000	6 kali	16,245,000	6 kali	16,245,000	6 kali	16,245,000	6 kali	16,245,000	24 kali
			- Pengadaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor	Persentase penyelesaian administrasi dan operasional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	100%	144,588,850	100%	140,000,000	100%	144,588,000	100%	144,588,000	100%	144,588,000	500%
			- Pengembangan/peningkatan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB) lanjutan	Terperuhnya sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB) lanjutan	-	-	-	1 Paket	25,500,000	1 Paket	25,500,000	1 Paket	25,500,000	1 Paket	25,500,000	4 Paket

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Sosialisasi/penyuluhan pelaksanaan uji berkala /laik jalan pada pengusaha angkutan dan pemilik kendaraan bermotor	Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan pelaksanaan uji berkala /laik jalan pada pengusaha angkutan dan pemilik kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,800,000	1 Kegiatan	30,800,000	2 Kegiatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Pelaksanaan ram check diterminal pada kendaraan bus/penumpang umum	Terlaksananya ram check diterminal pada kendaraan bus/penumpang umum			-	-	-	1 Kegiatan	31,782,000	1 Kegiatan	31,782,000	1 Kegiatan	31,782,000	3 Kegiatan
		2.09.2.09.0 1.021.	12 Program revitalisasi sarana dan prasarana transportasi daerah strategis dan cepat tumbuh	Persentase revitalisasi/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Darat			625,500,000									
			- Revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat	pelaksanaan revitalisasi fasilitas terminal pasiran	-	1 Lokasi	625,500,000									
		2.09.2.09.0 1.023.	13 Program peningkatan pelayanan publik bidang pehubungan	Persentase Peningkatan Layanan Publik Bidang Perhubungan			306,000,000									
			- Analisis kebutuhan lalu lintas	Pelaksanaan survei lapangan pencacahan lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan	-	12 Bulan	87,000,000									
			- Manajemen dan rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan audit dan inspeksi fasilitas keselamatan lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan	-	12 Bulan	52,000,000									
			- Peningkatan kepatuhan dan budaya berlalu lintas	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas serta pembinaan dan penindakan pelanggaran lalu lintas	-	12 Bulan	74,000,000									
			- Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah, dan Murah				93,000,000									
		4	URUSAN PENUNJANG				232,241,600		7,000,000		7,250,000		7,500,000		7,500,000	
		4.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				224,241,600									
Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan kapabilitas aparatur daerah	4.03.2.09.0 1.047.	14 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi			224,241,600		101,755,000		100,000,000		100,000,000			
			- Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Persentase Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	100%	100%	224,241,600	100%	101,755,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	-	-	400%
		4.05.	PEMERINTAHAN UMUM				8,000,000		7,000,000		7,250,000		7,500,000		7,500,000	
	Meningkatkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien	4.05.2.09.0 1.051.	15 Program penataan kelembagaan dan organisasi	Penilaian bobot jabatan dalam penetapan standar gaji ASN			8,000,000		7,000,000		7,250,000		7,500,000		7,500,000	
			- Penyusunan evaluasi jabatan pemerintah Kota Singkawang	Terusunnya dokumen evaluasi jabatan pemerintah Kota Singkawang	-	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	7,250,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	7,500,000	5 dokumen

erja Periode Akhir erangkat Daerah	Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi
Rp		
18	19	20
115,653,462,700		
115,616,212,700		
115,616,212,700		
21,957,915,950	DISHUB	Kota Singkawang
17,000,000		
14,231,038,590		
113,061,950		
125,405,000		
299,151,500		
523,393,520		
91,492,800		
764,450,000		
19,200,000		
249,620,000		
2,606,682,590		
661,700,000		

18	19	20
2,255,720,000		

18	19	20
2,610,100,000	DISHUB	Kota Singkawang
795,760,000		
32,450,000		
1,356,890,000		
202,500,000		
222,500,000		
274,500,000	DISHUB	Kota Singkawang
274,500,000		
80,500,000	DISHUB	Kota Singkawang
27,500,000		
26,500,000		
4,000,000		
22,500,000		
551,000,000	DISHUB	Kota Singkawang
94,300,000		
176,700,000		
80,000,000		
200,000,000		

18	19	20
-		Kota Singkawang
-		
-		
-		
-		
10,370,046,300	DISHUB	Kota Singkawang
627,385,000		
200,000,000		
755,488,000		
504,969,500		
1,024,138,250		
6,546,000,750		
222,000,000		
490,064,800		

18	19	20
9,408,106,575	DISHUB	Kota Singkawang
272,215,400		
2,723,012,275		
79,169,400		
535,202,000		
1,473,780,000		
1,646,988,000		
225,000,000		
405,200,000		
123,286,000		
567,250,000		
693,233,500		
663,770,000		
63,463,523,675	DISHUB	Kota Singkawang
456,457,550		
4,347,600,000		

18	19	20
573,158,250		
3,393,096,750		
500,000,000		
15,247,484,025		
276,542,100		
1,020,500,000		
35,450,660,000		
150,000,000		
-		
1,070,000,000		
978,025,000		
3,316,506,350	DISHUB	Kota Singkawang
361,398,200		
718,478,600		
180,000,000		
134,000,000		

18	19	20
461,245,450		
252,350,000		
159,034,100		
100,000,000		
301,000,000		
49,000,000		
191,000,000		
34,000,000		
375,000,000		
-		
3,584,013,850	DISHUB	Kota Singkawang
1,885,240,000		
610,250,000		
81,225,000		
718,352,850		
102,000,000		

18	19	20
91,600,000		

18	19	20
95,346,000		
	DISHUB	Kota Singkawang
	DISHUB	Kota Singkawang
37,250,000		
525,996,600	DISHUB	Kota Singkawang
525,996,600		
37,250,000		
37,250,000	DISHUB	Kota Singkawang
37,250,000		